

ASRUL SANI

Aturan Mustahil

Munculnya SKB 2 Menteri tentang standardisasi honor artis dan karyawan film yang cukup membuat pusing produser film nampaknya lahir seperti bayi aneh, lantaran tidak banyak orang film yang tahu. Termasuk para tokoh di bidang perfilman. Asrul Sani misalnya.

"Saya heran saya belum memperoleh kesempatan membaca poin-poin dari isi SKB 2 Menteri. Biasanya urusan macam begini masuknya ke Dewan Film lebih dahulu," ujar Asrul Sani, Wakil Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional.

"Saya kaget, dan tahu-tahu isi SKB 2 Menteri sudah resmi ditandatangani, sementara orang Dewan Film tak tahu apa-apa," ungkap Asrul yang hanya sempat menyimak isi SKB saat penyerahan insentif bagi pemenang Piala Citra FFI 1990 Desember lalu.

Berikut ini petikan wawancara dengan Asrul Sani, sebagai orang Dewan Film Nasional dan kapasitasnya sebagai tokoh perfilman.

Bagaimana tanggapan bapak tentang standard honor artis dan karyawan film di samping peraturan yang berlaku di dalamnya?

Mustahil itu dilakukan. Sudah dulu sering jadi pembicaraan. Hasilnya mana? Nol! Orang lupa di dunia seni, termasuk film tidak bisa menghilangkan faktor individual. Dunia film masih memiliki segudang tenggang rasa yang sifatnya riil. Selain itu para sutradara atau kru film lain tak bisa disamaratakan. Berbeda dengan karyawan film, lain seperti sopir, pengantar minuman yang melakukan tugas rutin.

Bagaimana kalau terjadi ada semacam klasifikasi dari artis dan karyawan film?

Itu sangat mengkhawatirkan. Kelak nanti akan tercipta klasifikasi kualitas sutradara atau karyawan film itu sendiri. Betapapun selalu ada peningkatan kualitas dari para sineas. Bergantung dari kesempatan dan keberadaannya.

Bisa kasih contoh?

Yenny Rachman pada tahun 70-an tak dikenal sebagai artis berbotob. Tapi pada dekade 80-an ia mendapat kesempatan bermain baik dan disutradarai sineas berbotob sehingga memungkinkan ia meraih Piala Citra.

Apa yang terjadi kalau klasifikasi tetap diberlakukan?

Mereka akan sulit mendapat kepercayaan untuk memasuki klasifikasi tinggi.



Doc. Vain

Tapi isi SKB 2 Menteri 'kan buat menaikkan honor para artis dan karyawan film, pak?

Kalau memang itu dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan menaikkan honor, itu masih bisa diterima. Tapi yang perlu diingat dari mana dana itu diambil untuk menaikkan honor? Dengan menekan produser untuk menutupi itu semua? Jangan lupa bahwa produser sendiri setengah mati berusaha mendapatkan modalnya kembali.

Apa sih kekhawatiran Pak Asrul sebagai orang film?

Yang saya takutkan yakni akan lebih parah lagi kalau para produser rugi. Kelak karyawan lagi yang akan mendapat susah.

Kesimpulannya?

Perlu dicari jalan keluar untuk mendapatkan dana menaikkan honor karyawan. Tidak cukup dengan dikeluarkan SKB 2 Menteri. Menaikkan honor karyawan berarti pembengkakan ongkos produksi. Kalau ongkos produksi naik, berarti modal yang harus dikembalikan pun membengkak. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan distribusi. Dan untuk melakukan itu hanya dengan dua cara: memperluas pasaran atau memproduksi film-film jorok saja yang jelas akan laku. Bisa juga dengan menaikkan HTM (Harga Tanda Masuk) walau harus dilakukan peninjauan secara khusus karena menyangkut kemampuan daya beli masyarakat.

Tapi biasanya peningkatan honor tidak akan meningkatkan nilai artis dan karyawan itu sendiri?

Faktor nasib, sangat mempengaruhi film. Meski sudah diberi honor besar, belum tentu menjamin hasil dari kreativitas si pembuat. Untuk itu faktor spekulasi di film sangat besar. Saya takut pukul rata dari Depnaker yang menyamakan honor karyawan film dengan tenaga kerja biasa. Suatu hal yang perlu diingat dan dipikirkan kembali bahwa Industri film berbeda dengan industri jasa lainnya.